



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 29 Juni 2019

Halaman: 2

TERAS
Nglarisi UMKM

PEMKOT Yogyakarta semakin serius mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM). Nantinya organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot yang memiliki kegiatan, diwajibkan membeli produk kuliner UMKM atau bahasa Jawa nglarisi. Caranya, OPD tinggal mengakses layanan Nglarisi dalam aplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang sedang dikembangkan Pemkot. Kelompok UMKM yang mendapat orderan tersebut, selanjutnya melakukan transaksi dan membuat pesanan.

Upaya nglarisi UMKM tersebut bukan tanpa alasan. Dalam satu tahun anggaran, Pemkot Yogyakarta menggelontorkan dana sekitar Rp 30 miliar untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum kegiatan OPD. Sejalan ini, anggaran tersebut sebagian besarnya justru terserap oleh pengusaha kuliner di luar Kota Yogyakarta. Hal ini wajar karena UMKM biasanya terkendala tenaga serta kelengkapan perizinan pangan industri rumah tangga (PIRT) atau kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) karena Pemkot Yogyakarta sudah menerapkan pembayaran nontunai untuk transaksi di atas Rp 500 ribu.

Besarnya peluang tersebut diharapkan memantik semangat UMKM kuliner di Kota Yogyakarta untuk bergerak. Hingga kini sudah ada sekitar 104 kelompok UMKM kuliner dengan 1.403 anggota di Kota Yogyakarta yang masuk dalam aplikasi Nglarisi. Dari jumlah tersebut, 400 anggota di antaranya merupakan warga kurang mampu yang memiliki kartu menuju sejahtera (KMS). UMKM ini memang disyaratkan harus menggandeng warga pemegang KMS, agar mereka lebih berdaya.

Kelompok UMKM kuliner yang bergabung dengan aplikasi JSS tersebut diharapkan semakin banyak. Pasalnya dari anggaran Rp 30 miliar di atas, serapannya masih sangat kecil, yakni sekitar Rp 1 miliar. OPD yang diwajibkan nglarisi tentu membutuhkan banyak pilihan menu yang ditawarkan kelompok kuliner. Toh sejauh ini, pelaku usaha telah mendapatkan bimbingan atau pelatihan dari koki hotel bagaimana menyajikan maupun mengemas produk kuliner dengan menarik serta higienis. Sehingga OPD yang memesan tersebut bukan karena terpaksa lagi, melainkan sudah menganggap UMKM memiliki daya saing.

Program Gandeng Gendong untuk mngentaskan kemiskinan di Kota Yogyakarta memang masih seumur jagung. Oleh sebab itulah, Pemkot menggandeng banyak pihak seperti swasta, perguruan tinggi, komunitas dan lingkungan kampung untuk menggandeng mereka yang kurang mampu menjadi lebih berdaya dan sejahtera. Apalagi rasio gini atau kesenjangan si kaya dan si miskin di wilayah tersebut masih terpaut tinggi. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembanguna 2. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 4. Dinas PMPPA	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

